SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

SALMA MAULIDYA
NIM. E1031221016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:
Salma Maulidya
NIM. E1031221016

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Salma Maulidya
NIM. E1031221016

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si Tanggal 20/7/2026.
NIP. 195709101987322002

Dosen Pembimbing Pendamping

Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A Tanggal 28/8/26
NIP. 199003182019031010

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

LEMBAR PENGESAHAN

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA**

Oleh :
Salma Maulidya
NIM. E1031221016

Dipertahankan di :
Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih., M.Si	Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A
NIP.195709101987032002	NIP.199003182019031010
Pembahas Utama	**Pembahas Pendamping**
Dr. Zulkarnaen, M.Si	Mutmainnah, S.IP., MPA.
NIP.196402081988l001	NIP. 199307122022032010

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP.197205212006041001

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Pendistribusian bantuan PKH memerlukan kolaborasi yang efektif antara Pemerintah Daerah, Satgas PKH, Pemerintah Desa, serta pihak pihak terkait agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Landasan teori yang digunakan adalah teori Collaborative Governance menurut Ansell & Gash yang meliputi empat konsep, yaitu Starting Condition (Kondisi Awal), Institutional Design (Desain Kelembagaan), Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif), dan Collaborative Process (Proses Kolaborasi). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara, Satgas PKH, aparat Pemerintah Desa, serta keluarga penerima manfaat (KPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek Starting Condition, koordinasi antar pemangku kepentingan telah dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan kegiatan pendampingan. Pada aspek Institutional Design, hubungan kerja sama antarinstansi telah terjalin dengan baik meskipun masih terdapat kendala dalam validasi data penerima manfaat. Pada aspek Fasilitative Leadership, setiap pihak telah menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek Collaborative Process, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bantuan PKH tersalurkan kepada keluarga yang berhak. Secara umum, penerapan Collaborative Governance dalam pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana telah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal sehingga diperlukan penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Program Keluarga Harapan (PKH), Distribusi Bantuan, Bantuan Sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Collaborative Governance in the distribution of Family Hope Program (FHP) assistance in Sukadana District, Kayong Utara Regency. The distribution of PKH assistance requires effective collaboration among the Regional Government, FHP Task Force, Village Government, and related parties to ensure it is distributed appropriately, transparently, and accountably. This study employed a qualitative approach with a descriptive research type. Ansell & Gash's Collaborative Governance theory, which comprises four ideas such as Starting Condition, Institutional Design, Facilitative Leadership, and Collaborative Process serves as the theoretical foundation. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with informants, including the Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment, and Village Affairs Agency of Kayong Utara Regency, the PKH Task Force, Village Government officials, and beneficiary families. The results of the study indicate that, in the Starting Condition aspect, coordination among stakeholders has been implemented through meetings and mentoring activities. In terms of Institutional Design, inter-agency cooperation has been well established, although challenges remain in validating beneficiary data. In terms of Facilitative Leadership, each party has carried out its role and responsibilities in accordance with applicable regulations. In the Collaborative Process, all parties share the same goal: ensuring FHP assistance is distributed to eligible families. In general, the implementation of Collaborative Governance in the distribution of FHP assistance in Sukadana District has been running well, but not optimally, so strengthening synergy and cross-sector coordination is needed to improve the effectiveness of program implementation.

Keywords: Collaborative Governance, Family Hope Program Aid Distribution, Social Assistance

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **"*Collaborative Governance* pada Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara."** Judul ini dipilih karena pendistribusian bantuan PKH melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Sosial, Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Satgas PKH, sehingga diperlukan kolaborasi yang efektif agar penyaluran bantuan dapat berlangsung tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pendistribusian bantuan PKH serta mengidentifikasi factor faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antarinstansi.

Penelitian difokuskan pada proses kolaborasi antaraktor dalam pendistribusian bantuan PKH dengan melihat mekanisme koordinasi, komunikasi, pembagian peran, serta penyelesaian kendala yang muncul selama proses penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara dengan pihak Dinas Sosial, , Satgas PKH, Pemerintah Desa, dan Keluarga Penerima Manfaat, serta dokumentasi untuk memperoleh gambaran pelaksanaan kolaborasi di lapangan.

Analisis penelitian menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash yang meliputi indikator kondisi awal (*Starting Conditions*), desain kelembagaan (*Institutional Design*), kepemimpinan fasilitatif (*Facilitative Leadership*), dan proses kolaborasi (*Collaborative Process*). Keempat indikator

tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana para pemangku kepentingan membangun kerja sama, menyusun mekanisme koordinasi, berbagi informasi, serta menyelesaikan permasalahan dalam pendistribusian bantuan PKH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pendistribusian bantuan PKH di Kecamatan Sukadana telah terlaksana melalui koordinasi dan kerja sama antarinstansi, terutama dalam proses verifikasi data, penyampaian informasi kepada penerima manfaat, serta pelaksanaan distribusi bantuan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pada aspek *Starting Conditions*, masih ditemukan kendala berupa ketidaksesuaian dan keterlambatan pembaruan data penerima manfaat. Pada aspek *Institutional Design*, mekanisme kerja dan pembagian tugas telah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan konsistensi. Pada aspek *Facilitative Leadership*, koordinasi antaraktor telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan komunikasi dalam penyelesaian kendala di lapangan.. Sementara itu, pada aspek *Collaborative Process*, telah terjalin komunikasi, koordinasi, dan saling berbagi informasi, meskipun masih terdapat hambatan dalam sinkronisasi data dan pelaporan perubahan kondisi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* pada pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, percepatan pemutakhiran data penerima manfaat, peningkatan komunikasi antaraktor, serta

penguatan komitmen bersama agar proses pendistribusian bantuan dapat terlaksana secara lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Salma Maulidya
Nomor Induk Mahasiswa	: E1031221016
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Studi	: Strata 1 (S-1)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapay karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dan diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pontianak, 9 September 2026

Yang membuat pernyataan



Salma Maulidya
E1031221016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Semoga Kebaikan Selalu Bersamamu, dan yang Terbaik Akan Datang Untukmu"

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"*

(QS. Ar-Ra'd:11)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Pintu surga sekaligus sumber doa disetiap langkahku, **Ibu Rusnani,** terimakasih sebesar besarnya peneliti berikan untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Terimakasih untuk peluk yang selalu menguatkan dalam lelah. Terimakasih karena sudah percaya bahwa peneliti bisa sampai di titik ini. Terimakasih karena pernah membesarkanku seorang diri. Setiap lelah yang disembunyikan, setiap doa yang dilangitkan, menjadi alasan peneliti mampu bertahan sampai saat ini. Terimakasih karena doa yang tak pernah henti, peneliti bisa sampai menyelesaikan skripsi ni.
2. Sosok yang tak banyak kata tapi penuh makna, **Bapak Firmansyah** terimakasih karena tidak pernah lelah memberikan doa, cinta, dan dukungan.. Terimakasih karena setiap langkah selalu disertai doa. Terimakasih untuk setiap lelah yang tidak pernah diperlihatkan.

Terimakasih untuk setiap peluh dan keringat yang tak pernah terlihat namun selalu terasa.

3. Pelindung dalam diam, Bapakku juga Bapak **Usman Supriadi**, terimakasih karena meski sambung tapi kasih sayangmu seperti kandung. Di sisimu aku tumbuh dan bernaung. Tak ada beda dalam peluk yang kau lindung,. Bukan darah yang mengikat tapi hati yang menyambung. Setiap doa kau ucap tulus tak terhitung, menjagaku dengan sabar, menerimaku apa adanya, tanpa membedakan mana sambung mana kandung.
4. Kepada Saudaraku, **Rahman Hakim, Tiara Kumala** dan **Fathan Raziq,** gelar ini peneliti persembahkan sebagai wujud terimakasih atas doa, motivasi, semangat dan dukungan yang kalian berikan. Terimakasih karena selalu membersamai peneliti hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Kakek dan Nenek, **Alm. Ali Rahman dan Alm.. Rumiah,** Alfatihah**.** Terimakasih karena selain menjadi kakek dan nenek, kalian juga menjadi ibu dan ayah untuk peneliti. Ditangan yang sudah renta, peneliti tumbuh dengan cinta yang tak pernah meminta balasan. Membuatku tidak kekurangan dan sama seperti kebanyakan anak sebayaku pada umumnya. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai wujud terimakasih atas kasih sayang yang diberikan kepada cucu perempuan pertama kalian. Semoga kakek dan nenek bisa melihat dengan bangga karena peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk Paman dan Bibiku, **Zuhairiah, Hendra Yuliadi, Ricky Irawan** dan **Liza Eliyanti,** terimakasih untuk segala bentuk dukungan, motivasi dan semangat untuk peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"*Collaborative Governanve* Pada Pendistribusian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara".**. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. .
2. Prof. Dr. Hj. Sri Haryaningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam melakukan proses penelitian ini.
3. Haunan Fachry Rohilie, S.IP., M.A selalu Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam melakukan penelitian ini.
4. Dr. Zulkarnaen, M.Si selaku dosen pembahas utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk penelitian ini.
5. Mutmainnah S.IP., MPA selaku dosen pembahas pendamping yang telah banyak memberikan masukkan dan saran untuk penelitian ini.
6. Dr. Viza Juliansyah, S.Sos, MA.,M.IR selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura.

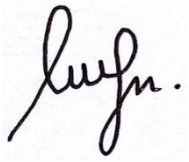
7. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
8. Bima Sujendra S.IP., M.Si selaku Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah mengarahkan dan menyetujui penelitian ini.
9. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Dosen Jurusan Ilmu Administrasi, Staff Tata Usaha, Staff Akademik dan Staff Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara yang telah memberikan izin penelitian serta membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.
12. Pemerintah Desa Harapan Mulia yang telah memberikan izin penelitian serta membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian.
13. Satgas PKH yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data dan informasi selama proses penelitian.
14. Salma Maulidya, tentunya terimakasih sebanyak banyaknya untuk diri sendiri, karena mampu berdiri sejauh ini, karena telah mau bersyukur atas apapun yang Tuhan beri, karena sudah berani bermimpi dan berhasil menggapainya hari ini. Apresiasi yang sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.

15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) serta seluruh pengurus HIMAPEM yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan kebersamaan kepada peneliti selama perkuliahan.
16. Anggota bidang UMH HIMAPEM periode 2023/2024 yang telah membantu dan mendukung peneliti selama proses perkuliahan.
17. Teman seperjuangan, sahabat dan keluarga peneliti Ukhtie, yaitu Jiya dan Dea yang telah menemani peneliti, berbagi pendapat, berbagi keluh kesah bertukar pikiran, dan saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sepupu sekaligus sahabat peneliti yang tergabung dalam Calon Rich Aunty, yaitu Risma, Uci dan Sasa yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu memberi dukungan tanpa henti dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
19. Teman teman peneliti dari SMP hingga kuliah, Dwi, Ratri, Rifka, Nisa, Dea, Ica, Tari dan Ratna, yang telah memberi dukungan, semangat dan kenangan kepada peneliti dari SMP hingga sekarang.
20. Teman teman Group Date yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada peneliti hususnya untuk Andre, Risma, Bagus, Uci, Gansa, Sasa, Depo, Udin, dan Bella.
21. Teman kos peneliti, kak Via yang selalu memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
22. Teman teman KKM, yang telah memberikan dukungan, semangat, keberasamaan dan kenangan selama KKM berlangsung.

23. Teman dekat sekaligus support sistem dari 2022 hingga saat ini Andrean Maulana, yang selalu menjadi sandaran ternyaman, pendengar curhat yang baik, pemberi afirmasi baik, menemani dalam proses panjang menyelesaikan perkuliahan, serta menjadi tempat berbagi cerita dalam setiap keadaan.

Serta berbagai pihak terkait yang telah memberikan pertolongan dan memberikan bantuan peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga berbagai kebaikan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih oleh Allah SWT, serta dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada pembaca. Untuk itu peneliti mengharapkan segala saran dan kritik membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Pontianak, 9 September 2026



Salma Maulidya
E1031221016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
LEMBAR PERSETUJUAN i
LEMBAR PENGESAHAN ii
ABSTRAK iii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR LAMPIRAN xxi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13
2.1 Definisi Konsep 13
2.1.1 Kolaborasi 13
2.1.2 Program Keluarga Harapan (PKH) 14
2.2 Teori 16
2.2.1 Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash 2008) 16
2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan 26

2.3.1 Lestari & Nurhayati (2020), Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lombok Timur. 26
2.3.2 Dewi & Kurniasih (2022), Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kendal. 27
2.3.3 Suharto (2017), Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. 27
2.4 Alur Pikir Penelitian 28
2.5 Pertanyaan Penelitian 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Jenis Penelitian 32
3.2 Langkah-Langkah Peneltian 33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 36
3.3.1 Lokasi Penelitian 36
3.3.2 Waktu Penelitian 37
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 38
3.4.1 Subyek Penelitian 38
3.4.2 Obyek Penelitian 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7 Analisis Data 42
3.7.1 Keabsahan Data 42
3.7.2 Teknik Analisis Data 44
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 46
4.1 Kondisi Geografis 46
4.1.1 Letak Wilayah 46
4.1.2 Luas Wilayah 47
4.2 Kondisi Demografis 49
4.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk 49
4.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia 51
4.3 Kondisi Sosial Budaya 53
4.3.1 Kondisi Kesehatan Masyarakat 53

4.3.2 Pendidikan 54
4.3.3 Mata Pencaharian 55
4.3.4 Kesejahteraan Masyarakat 56
4.3.5 Agama 57
4.3.6 Budaya 58
4.4 Gambaran Umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara 59
4.4.1 Misi dan Motto 59
4.4.2 Susunan Organisasi 60
4.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi 61
4.3.4 Struktur Organisasi 64
4.4.5 Sumber Daya Manusia 65
4.4.6 Sarana dan Prasarana 67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 69
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 69
5.1.1. Dinas SP3APMD, Satgas PKH dan Masyarakat 70
5.2 Hasil dan Pembahasan 102
5.2.1 Starting Condition (Kondisi Awal) 102
5.2.2 Institutional Design (Desain Kelembagaan) 104
5.3 Fasilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif) 107
5.4 Collaborative Process (Proses Kolaborasi) 109
BAB VI PENUTUP 112
6.1 Kesimpulan 112
6.2 Saran 115
6.3 Keterbatasan Penelitian 117
DAFTAR PUSTAKA 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 4
Tabel 1. 2 Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2021 ... 8
Tabel 1. 3 Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2024 ... 9
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 37
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Sukadana 2023 48
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Sukadana 2023 50
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sukadana 52
Tabel 4. 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sukadana 54
Tabel 4. 5 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Sukadana 56
Tabel 4. 6 Persentase Penduduk Berdasarkan Agama 57
Tabel 4. 7 Persentase Penduduk Berdasarkan Suku 58
Tabel 4. 8 Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara 66
Tabel 4. 9 Data Sarana dan Prasarana Dinas SP3APMD Kabupaten Kayong Utara 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep *Collaborative Governance* Ansell & Gash 25
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir 30
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Sukadana 47
Gambar 4. 2 Visi dan Misi Dinas SP3APMD 59
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD) Kabupaten Kayong Utara 65
Gambar 5. 1 Sosialisasi Bantuan Sosial Kabupaten Kayong Utara 72
Gambar 5. 2 Sosialisasi Dinas SP3APMD, Pemerintah Desa dan Satgas PKH Terkait Distribusi PKH 84
Gambar 5. 3 Koordinasi Antara Dinas SP3APMD Kayong Utara dan Anggota DPRD Dapil Ketapang dan Kayong Utara 92
Gambar 5. 4 Diskusi Dinas SP3APMD Bersama BKD Terkait Evaluasi Keuangan 99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Penelitian Skripsi Dengan Judul 123
Lampiran Ii Pedoman Observasi 127
Lampiran Iii Surat Tugas Penelitian 128
Lampiran Iv Dokumentasi Penelitian 130
Lampiran V Daftar Riwayat Hidup 137

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan hal yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, karena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial. Kebijakan pemerintah pun terasa terbatas dalam menanggulanginya, sehingga tidak ada satu titik kepastian kapan akan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengembangkan berbagai program sosial untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin. Salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada tahun 2007 dan terus dikembangkan hingga saat ini.

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk membantu keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian bantuan tunai yang terarah. Bantuan ini diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan syarat minimal satu komponen yang menjadi sasaran program, seperti ibu hamil, anak berusia 0-6 tahun, anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA, lanjut usia 60 tahun keatas dan anggota keluarga dengan disabilitas berat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau

jasa kepada seseorang atau keluarga miskin dan rentan terhadap resiko sosial. Melalui bantuan bersyarat, Program Keluarga Harapan memberikan dukungan finansial kepada keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Sejak peluncurannya, program ini terus berkembang, baik dari jumlah penerima manfaat, maupun besaran bantuan yang diberikan.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pendistribusian Bantuan Sosial, dalam peraturan ini menuntut adanya koordinasi serta kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pendamping Sosial atau Satgas. Pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui struktur yang telah ditetapkan. Kementerian Sosial berperan sebagai pengambil kebijakan dan penentu regulasi program, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial bertugas mengkoordinasi pelaksanaan dilapangan dan Aparat Desa serta Satgas melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi pelaksana langsung dalam proses verifikasi data, penentuan serta penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang mengatur secara lengkap mengenai sasaran penerima manfaat, mekanisme penetapan peserta, pendistribusian bantuan, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Dimulai dari penetapan sasaran, dimana pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) untuk menentukan keluarga miskin atau rentan yang berpotensi menjadi penerima Program Keluarga Harapan. Data ini kemudian di verifikasi dan di validasi oleh Pemerintah Daerah Bersama pendamping sosial atau satgas untuk memastikan bahwa warga yang terdaftar benar benar memenuhi kriteria seperti ibu hamil. balita, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas berat.

Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukadana masih sering tidak tepat sasaran karena menurut Artikel Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara banyak keluarga tidak miskin justru menerima bantuan, sedangkan keluarga miskin yang berhak malah tidak menerima bantuan. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa kriteria penerima manfaat sering tidak tepat sasaran sehingga menghambat tujuan program mengurangi kemiskinan. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan bahwa ketidakakuratan data menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pelayanan publik di Kayong Utara. Dalam penuturan Satgas PKH yang turun langsung untuk mensurvei data penerima Program Keluarga Harapan, ketidakakuratan data yang dimaksud yaitu informasi penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti kesalahan penulisan nama, NIK yang tidak cocok dengan data Dukcapil, atau penerima yang sudah tidak layak tetapi masih tercantum dalam daftar. Masyarakat di Kecamatan Sukadana mengeluhkan beberapa penerima juga tidak memenuhi syarat sebagai penerima, karena survei yang dilakukan oleh satgas sebagian besar masih melakukan praktik nepotisme, dimana setiap survei yang dilakukan satgas hanya dilakukan pada beberapa keluarga penerima manfaat saja, tidak dilakukan pada semua masyarakat yang

memenuhi kriteria, sehingga masyarakat yang merasa dirinya memenuhi kriteria malah tidak menerima bantuan sedangkan yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan. Akibatnya, bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang seharusnya berhak.

Tabel 1. 1

Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Kriteria Penerima	Nominal Pertahap	Nominal Pertahun
1	Ibu Hamil	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
2	Anak Usia Dini	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
3	Anak Sekolah SD	Rp. 225.000	Rp. 900.000
4	Anak Sekolah SMP	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
5	Anak Sekolah SMA	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
6	Lansia & Disabilitas	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000

Sumber:(Diolah oleh penulis dari diss3apmd.kayongutarakab.go.id)

Dari hasil pra survei, di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, kondisi awalnya yaitu proses penetapan data penerima bantuan Program Keluarga Harapan masih didominasi oleh keputusan sepihak dari aparat desa maupun petugas lapangan tanpa keterlibatan warga. Masyarakat mengeluhkan sebagian besar penentuan data penerima Program Keluarga Harapan masih didominasi oleh hubungan kekerabatan tanpa mempertimbangkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penetapan penerima bantuan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan penerima bantuan yaitu satgas harus melakukan survei pada keluarga yang akan didata, namun kenyataannya

survei hanya dilakukan pada sebagian keluarga yang dianggap layak dari segi fisik saja, tanpa mempertimbangkan kriteria kriteria lainnya yang sudah diatur dalam kriteria penerima bantuan. Permasalahan pendistribusian yang tidak tepat sasaran ini bukan hanya berdampak pada efektivitas program, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam bantuan Program Keluarga Harapan disebabkan oleh penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat saat ini. Dilihat dari data jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang didapat dari website Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara 2021 (dissp3apmd.kayongutarakab.go.id) Sebagian penerima bantuan di Kecamatan Sukadana berasal dari keluarga yang tergolong mampu yaitu sekitar 200 keluarga (KK) dari total keseluruhan 838 keluarga (KK).

Di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, permasalahan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan menunjukkan bahwa persoalan ketidaktepatan sasaran tidak lagi semata mata disebabkan oleh kesalahan data pusat, tetapi juga dipengaruhi kuat oleh dinamika di tingkat desa. Meskipun pemerintah telah menggunakan basis data seperti DTKS, nyatanya data tersebut seringkali tidak langsung digunakan, melainkan disesuaikan kembali melalui mekanisme musyawarah desa (musdes).

Dalam proses ini, Pemerintah Desa bersama masyarakat melakukan verifikasi dan bahkan menetapkan ulang kriteria penerima bantuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa data awal dianggap belum sepenuhnya akurat atau tidak

sesuai dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Ditemukan indikasi tumpang tindih bantuan, di mana sebelumnya ada warga yang menerima lebih dari satu jenis bantuan sosial. Kondisi ini menandakan bahwa integrasi data antarprogram belum berjalan optimal di tingkat lapangan. Di sisi lain, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang cepat juga tidak selalu diikuti dengan pembaruan data secara berkala, sehingga ada warga yang seharusnya layak justru tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak layak masih tercatat sebagai penerima.

Pemerintah sebagai fasilitator perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat, yang bertujuan agar pemerintah desa yang menaungi masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat sehingga pendistribusian Program Keluarga Harapan dapat berjalan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu mengurangi kemiskinan.

Di Kabupaten Kayong Utara tepatnya di Kecamatan Sukadana yang merupakan satu diantara Kecamatan penerima bantuan Program Keluarga Harapan, menurut penulis dalam pengamatan pra survei, masih terdapat berbagai masalah. Pertama, mengenai salah sasaran, Program Keluarga Harapan yang seharusnya disalurkan kepada keluarga miskin ternyata jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini disebabkan oleh ketidakakuratan data, dimana satgas justru mensurvei masih menggunakan praktik nepotisme dan hubungan kekerabatan tanpa menggunakan pengamatan atau survei langsung.

Beberapa laporan masyarakat melalui kanal media sosial pemerintah daerah dan berbagai forum publik menunjukkan adanya keluhan seperti “mengapa tetangga yang dianggap mampu masih menerima PKH?” dan “mengapa saya yang miskin tidak masuk data?”. Keluhan-keluhan tersebut mencerminkan munculnya rasa ketidakadilan di kalangan warga dan menandakan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam *Collaborative Governance,* pemerintah berperan sebagai pengelola kolaborasi dalam pelaksanaan program seperti Program Keluarga Harapan. Pemerintah tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memverifikasi data berbasis DTKS, mengoordinasikan berbagai pihak agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan akuntabilitas.

Berdasarkan data resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara, jumlah keluarga yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan mengalami perubahan dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Terjadi peningkatan jumlah penerima dari 5.085 keluarga (KK) pada tahun 2021 menjadi 5.417 keluarga (KK) pada tahun 2024 yang menunjukkan adanya kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Data dari Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara (Profil Kependudukan 2021) menunjukkan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sukadana tercatat 838 keluarga (KK). Pada tingkat Kabupaten penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.085 keluarga (KK).

Tabel 1. 2

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2021

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga (KK)
1	Sukadana	838
2	Simpang Hilir	1.266
3	Teluk Batang	1.428
4	Pulau Maya	850
5	Seponti	507
6	Kepulauan Karimata	196
TOTAL		**5.085**

Sumber:(Diolah oleh penulis dari diss3apmd.kayongutarakab.go.id)

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kayong Utara (Profil Kependudukan 2024), jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukadana tercatat 916 keluarga (KK). Pada tingkat Kabupaten total penerima Program Keluarga Harapan tahun 2024 adalah 5.417 keluarga (KK).

Tabel 1. 3

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2024

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga (KK)
1	Sukadana	916
2	Simpang Hilir	1.502
3	Teluk Batang	1.256
4	Pulau Maya	1.137
5	Seponti	356
6	Kepulauan Karimata	250
TOTAL		**4.417**

Sumber: (Diolah oleh penulis dari diss3apmd.kayongutarakab.go.id)

Permasalahan kedua, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sukadana belum sepenuhnya akurat sehingga masih banyak masyarakat miskin yang memenuhi kriteria justru tidak terdata. Dalam hasil pra survei, penentuan penerima Program Keluarga Harapan banyak ditemukan kendala, hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Satgas yang dibentuk untuk melakukan survei, seperti hasil survei yang dilakukan Satgas PKH berbeda dengan kenyataan sebenarnya, masih banyak ditemukan keluarga yang tergolong tidak mampu secara finansial namun memiliki aset seperti tanah dan kebun, mempunyai suami yang masih bekerja dan tergolong masih dalam usia produktif.

Dokumen resmi (Profil Kependudukan Kabupaten Kayong Utara) menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin dan keluarga rentan miskin

mengalami perubahan signifikan setiap tahun, sementara data penerima Program Keluarga Harapan tidak selalu diperbarui. Ketidaksinkronan ini mencerminkan adanya keterlambatan pemutakhiran data antara Dinas Sosial, dan Pemerintah Desa, sehingga memunculkan kasus di mana keluarga yang ekonominya telah membaik masih tetap menerima bantuan, sementara keluarga yang baru masuk kategori miskin justru belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan.

Permasalahan ketiga, yaitu pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan yang tidak sesuai dengan jadwal, yaitu masih sering terjadi keterlambatan sehingga masyarakat tidak mengerti apa penyebab dan masalahnya. Masyarakat di Kecamatan Sukadana mengeluhkan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan yang sering kali meleset jauh dari tanggal yang sudah di tetapkan, sehingga hal ini menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi oleh Pemerintah Desa.

Adanya berbagai permasalahan dalam pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara membuat tidak efektifnya program yang telah diberikan oleh pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa persoalan yang menjadi permasalahan penelitian, yaitu :

1. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menunjukkan masih adanya keluarga tidak miskin yang menerima bantuan, sementara keluarga miskin terabaikan.
2. Koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Satgas PKH masih lemah.
3. Data penerima bantuan yang tidak akurat serta lemahnya koordinasi antar lembaga menghambat efektivitas pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

1.3 Fokus Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dijabarkan diatas, maka fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* pada pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kayong Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **"**Bagaimana *Collaborative Governance* dalam pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kayong Utara untuk memastikan bantuan tepat sasaran?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative Governance* dalam pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kayong Utara guna memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya penerapan *Collaborative Governance* pada pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu penelitian ini juga menambah literatur mengenai efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya terkait kolaborasi antar aktor dalam mewujudkan tata kelola bantuan yang berkeadilan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam memperbaiki mekanisme pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tepat sasaran, transparan dan adil. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi aparat desa dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan dalam proses penyaluran bantuan.